

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Peningkatan Pembentukan Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi

Laros Tuhuteru

Pos-el: larostuhuteru@yahoo.com

Abstrak

Peningkatan kurikulum yang saat ini di kembangkan khususnya Pendidikan Karakter yang di proses oleh tenaga ahli tentunya dapat dibarengi oleh peran aktif pemerintah. Hal tersebut tentu saja harus memunculkan ide ide solutif dari berbagai pihak demi menjawab perkembangan arus global. Biasa dapat dilihat bahwa saat ini kita mengalami penurunan jati diri serta konsep moral dan mentalitas akan suatu idiologi asli bangsa. Dalam kenyataan yang ada, banyak ragam tayangan tindakan kekerasan, perilaku tak berkarakter oleh media yang diporakporandakan oleh kebebasan yang tak terkendali. Hal tersebut sangat mencolok yang saat ini terjadi di bangsa tercinta. Pendidikan karakter tepat untuk mengembalikan nilai-nilai kepribadian setiap warga negara, tetapi hal itu harus di apresiasi oleh semua pihak walaupun hasilnya akan tercapai setelah satu generasi. Untuk Indonesia Lebih Bermartabat.

Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter Bangsa, Globalisasi

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengembang misi nasional bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value-based” konfigurasi atau kerangka sistematis PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: *Pertama*, PKn secara kurikulum dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warganegara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, fisikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, Kewarganegaraan yang demokratis serta bela negara. *Ketiga*, PKn secara pragmatis dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*conten embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, Kewarganegaraan yang demokratis, serta bela negara.

Di arus globalisasi saat ini terus bergulir sekaligus mengukuhkan hegemoni kebebasan yang juga cenderung otoritarian. Karakter bangsa kita terlihat santun dan subtle nyaris diprakporandakan oleh kebebasan yang tak terkendali, diantaranya banyak ragam kekerasan yang menyembul, mulai yang bersifat fisik, maupun simbolik. Yang menjadi persoalan kemudian,

jika aneka ragam kekerasan tersebut mala dapat dipandang sebagai suatu keniscayaan ini yang harus diajukan sebagai pertanyaan bangsa karena nyaris setiap detik generasi muda kita diberikan tayangan kekerasan sesuai perkembangan globalisasi saat ini dari segala sisi mulai dari yang mengusir perilaku masyarakat serta generasi muda, dari realita peran media cetak, elektronik dan bahkan multimedia. Secara sosial, kekerasan itu akan menjadi keniscayaan apabila secara terus menerus dibentuk secara sistematis lewat sebuah realitas maka, pendidikan karakter yang oleh Bung Karno diberi label *nation and karakter building* menemukan relevansinya kembali. Nilai-nilai luhur bangsa ini sudah sejak dahulu dapat dipraktek oleh para leluhur dan dapat pula diwariskan secara turun temurun kepada generasi bangsa namun di era digital dan globalisasi saat ini nyaris terkikis oleh hegemoni kebebasan yang sepatutnya kita gali kembali untuk reaktualisasi agar dapat membentengi generasi muda atau anak cucu kita mulai dari sekarang dan yang akan datang terhadap perkembangan globalisasi yang tidak berkarakter, seperti budaya kekerasan.

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*) yang merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial-budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa

dan negara Indonesia yang merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai Pancasila dan UUD 1945. Dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga nilai dan norma, hak asasi manusia, kekuasaan dan politik, masyarakat demokratis, Pan-casila dan konstitusi Negara, serta globaisasi. Oleh karena itu, dapat diwajibkan kepada warga negara untuk menguasai Pendidikan Kewarganegaraan dan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menghadapi masalah kewarganegaraan termasuk masalah globalisasi.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup secara berdampingan dengan sesama.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

Mengenai pengertian Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa sebagai generasi muda untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka keilmuan pokok serta disiplin ilmu-ilmu yang lain. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran dan sebagai mata kuliah merupakan salah satu status pendidikan kewarganegaraan yang praksis dalam pendidikan di Indonesia sekarang ini. Sebagai mata pelajaran di sekolah, PKn berdasarkan Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang standar isi. Menurut ketentuan tersebut, PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Karakter Bangsa

Karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik (tahu nilai kebaikan, atau mau berbuat baik, dan nyata kehidupan yang baik) yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren mencari dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah karsa serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas, moral dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan globaisasi.

Karakter bangsa adalah upaya kolektif sistematis suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negaranya sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban. Semuanya itu untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi, IPTEK yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Istilah karakter bangsa, dalam literatur Barat dengan "*national character*" sangat erat kaitannya dengan masalah psikologi sosial. Para ahli Morgenthau (Budimansyah dan Suryadi 2008: 77) mendefinisikan karakter bangsa dalam konteks negara-bangsa (*nation state*) sebagai salah satu unsur kekuatan nasional (*nation power*) dalam politik antar-bangsa. De Vos (1968:14) mendefinisikan karakter bangsa sebagai berikut: *the term "national character" is used to describe the enduring personality characteristics and unique life style found among the populations of particular nation states*. Dengan kata lain, bahwa karakter bangsa digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri kepribadian yang tetap dan gaya hidup yang khas yang ditemui pada penduduk negara bangsa tertentu, karena terkait dengan masalah kepribadian yang merupakan bagian dari aspek kejiwaan maka diakui oleh De Vos bahwa dalam konteks perilaku, karakter bangsa dianggap sebagai istilah yang abstrak yang berkaitan dengan aspek budaya dan termasuk dalam mekanisme psikologis yang menjadi karakteristik masyarakat tertentu.

Kewarganegaraan yang Berkarakter Pancasila

Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan Pancasila dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka, pendidikan Pancasila sebagai instrumental untuk membangun warga negara yang baik (*good citizenship*) yang berkarakter Pancasila dan meyakini kebenaran dan kekuatan Pancasila

dalam mencapai cita harus diberikan kepada setiap generasi bangsa. Persoalannya adalah apakah isi substansi materi yang akan diberikan serta fokus penekanan yang kita prioritaskan dari ketiga fungsi Pancasila tersebut.

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pada kurikulum 1994 disebutkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Di samping itu PPKn juga dimaksudkan untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Kemudian secara tegas disebutkan bahwa tujuan PPKn adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Dari tujuan juga jelas berbeda. PPKn lebih menekankan pada pembentukan karakter (efektif), sedangkan PKn lebih menekankan pada aspek berpikir kritis (kognisi). Sebenarnya antar moralitas dengan berpikir bukan dua hal yang terpisah sama sekali. Keduanya mempunyai hubungan kemampuan berpikir/ kognisi seharusnya membimbing perilaku, sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan juga semakin baik sikap dan moralnya, sebagaimana dalam pepata "ilmu padi" semakin berisi semakin merunduk. Secara filosofis buah dari ilmu itu adalah *wisdom*/bijaksana. Oleh karena itu seharusnya pendidikan mampu merubah perilaku seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka, semakin bijak sikap dan perilakunya.

Arus Globalisasi di Indonesia

Dalam usia 72 tahun kemerdekaan republik Indonesia tentu banyak kemajuan yang telah dicapai. Namun, di sisi lain daftar pekerjaan rumah masih panjang untuk ditentukan salah satunya ialah banyak ragam tayangan media elektronik di dalamnya memunculkan kekerasan yang terjadi, dari yang bersifat fisik maupun simbolik yang dipandang sebagai suatu keniscayaan terhadap peniruan generasi muda bangsa. Sebuah sektor keamanan yang dapat diandalkan,

terstruktur dan terlatih yang bisa membantu menyediakan lingkungan yang aman dan terlindungi pengaruh globalisasi yang negatif sangat dibutuhkan bagi rakyat Indonesia dan anak cucu kita. Memang perkembangan globalisasi tidak sedikit mempunyai dampak buruk bagi masa depan anak bangsa. Apalagi jika aneka ragam budaya asing disertai dengan kekerasan maka ideologi bangsa kita akan terkikis oleh globalisasi yang tak terkendali, dapat disadari bahwa ideologi pada suatu bangsa memiliki ciri khas serta karakteristik yang berbeda sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Jika ideologi bangsa kita terkikis dengan adanya globalisasi maka bangsa kita tidak lagi mempunyai karakteristik dan ciri khas negara Pancasila. Oleh karena itu sebagai generasi muda sekaigus warga negara yang baik maka kita harus dapat membangun karakter bangsa dan negara sesuai dengan ideologi bangsa dan negara kita yaitu Pancasila.

Inilah dampak dari globalisasi memang disisi lain kita telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu kita dapat berkreasi menciptakan inovasi-inovasi baru sesuai perkembangan IPTEK dan globalisasi. Namun tidaklah kita ingat dari dampak negatif yaitu, semakin merosotnya nilai-nilai sosial akibat kecil dari semakin majunya teknologi yang ada saat ini. Oleh karena itu perlu sekali kiranya menghidupkan program pendidikan karakter yang nantinya akan meluruskan kembali jalan para generasi muda sesuai dengan cita-cita bangsa.

Penutup

Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya merasa cemas melihat sebuah realita penurunan budi pekerti sebagai bagian dari karakter bangsa di kalangan warga negara bangsa di tengah arus globalisasi tentunya diimbangi rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kemajuan teknologi ibarat dunia tanpa batas. Proyek besar bangsa saat ini harusnya mengembalikan karakter bangsa Indonesia yang lebih baik, yang tentu hal tersebut dimulai dari proses pendidikan serta ide-ide solutif dari berbagai pihak, keran kita bisa dapat melihat bahwa saat ini mengalami penurunan konsep moral dan mentalitas akan suatu ideologi asli bangsa Indonesia. Dengan demikian pendidikan karakter tepat untuk mengembalikan nilai-nilai kepribadian setiap warga negara, tetapi hal itu harus diapresiasi oleh semua pihak, walaupun hasilnya akan tercapai setelah satu generasi bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Azizy, Qodri. (2002). *Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial: Mendidik Anak Sukses Masa Depan Pandai dan Bermamfaat*. Semarang: Aneka Ilmu.

Budimansyah & Suryadi. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Sekolah Pascasarana Universitas Pendidikan Indonesia

Dasim Budimansyah. (2002). *Model Pembelajaran Penilaian dan Berbasis Portofolio*. Bandung: Genesindo.

Depdiknas. (2004). *Pedoman Pemilihan Pemanfaatan Bahan Ajar*. Jakarta.

Depdiknas. (2006). *Silabus Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bahan Presentasi: Jakarta

Muchson A. R (2003). Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Manifestasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional Kurikulum Berbasis Kompetensi. 2002 Kewarganegaraan diselenggarakan oleh Program Studi PPKn FKIP UNS, 29 Maret 2003.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Naskah Lampiran Permendiknas No 22 Tahun 2006. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (Puskurlitbang).

Pembangunan Karakter Bangsa. 2010-2025, Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa. Pemerintah Republik Indonesia.

Udin S. Winataputra. (2003). Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan demokrasi. http://www.depdiknas.go.id/jurnal/45/udin_s_winataputra.htm

Kompas, 17/10/2003

Kompas, 22/10/2003

Gatra, 29/5/2004